



## Di Kuta Ada Papan Reklame Dibangun 'Bertingkat', Pekab Belum Tahu

MANGUPURA, NusaBali

Walaupun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung pekan lalu menegaskan belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan reklame (IMBR), tetapi ada saja aktivitas pembangunan reklame baru di lapangan. Salah satunya terpantau, Minggu (26/4), di perempatan Jalan Imam Bonjol-Jalan Raya Kuta.

Yang menarik pembangunan papan reklame ini berada di atas papan reklame yang sudah ada. Sehingga sepintas tampak bertingkat. Bangunan rangkanya pun nyaris sama dengan rangka reklame di bawahnya.

Kepala BPPT Badung I Made Sutarna ketika dikonfirmasi tak banyak berkomentar. "Besok saya cek dulu," ucapnya. Melalui pesan singkat yang dikirimkan untuk menanyakan perihal berapa jumlah permohonan IMBR, belum ada jawaban lagi dari pejabat yang juga mantan Kadishubkominfo Badung tersebut.

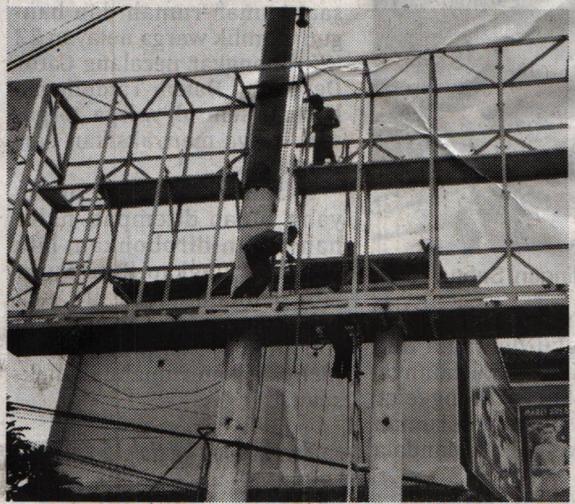
Sementara Kepala Satpol PPI Ketut Martha juga mengatakan belum mengetahui. "Saya belum tahu, memang ada (pembangunan papan reklame baru, Red), di mana?," ucapnya. "Coba saya cek dulu ke staf," tegasnya.

Menurut Martha dari hasil koordinasi dengan BPPT, belum ada izin baru IMBR yang dikeluarkan. Tetapi untuk yang disebutkan tersebut pihaknya tidak mau mengklaim dulu itu adalah pelanggaran, sebab secara kasat mata belum mengecek ke lapangan termasuk belum mengonfirmasi kepada pihak pemilik untuk menanyakan perihal dokumen perizinan.

"Tetapi kemungkinan itu mengubah desain dari semula tidak ber-style Bali dibikin seperti style Bali, karena itu merupakan persyaratan yang ada dalam Perbup Badung Nomor 80 Tahun 2014. Kalau BPPT sudah mengeluarkan izin kepada pemohon, pemohon diberikan waktu untuk membangun atau menyesuaikan agar papan reklame memiliki style Bali," beber pejabat asal Karangasem, itu.

Atau bisa juga, imbuh Martha, mengubah dari yang sebelumnya dirancang untuk LED menjadi papan reklame biasa. "Di sana kan dilarang ada LED, mungkin itu diubah menjadi papan reklame, bisa juga. Tetapi karena kami belum melihat yang sebenarnya, maka kami belum bisa mengambil sikap," kata Martha.

Terkait dengan upaya penataan papan reklame/billboard ukuran jumbo di Badung selama rentang waktu Januari hingga April 2015, sudah sekitar 27 reklame yang dibongkar. Paling banyak di kawasan Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta. Sedangkan untuk yang kecil-kecil jumlahnya sudah melebihi 300. **as**



• NUSABALI/YUDA

Edisi : Senin, 27 April 2015

Hal : 2



## Gundah SMA/SMK Diambilalih Provinsi

AMLAPURA, NusaBali

Rencana SMA/SMK diambilalih Pemerintah Provinsi (Pemprov) per 1 Januari 2017, mengundang kegundahan hati Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg. Kegundahan itu menyangkut aset tanah sekolah yang selama ini pengadaannya dilakukan Pemkab Karangasem. Untuk itu, Geredeg berharap UU No 23 tahun 2014 yang mengatur soal kewenangan pengelolaan SMA/SMK itu bias ditinjau kembali pemberlakuan-nya.

"Kita sudah tuntas mendata aset tanah sekolah dan kantor pemerintah di Karangasem. Tercatat luas aset tanah seluas 2.131.083 meter persegi (m2) dengan nilai taksiran sebesar Rp 122,917 miliar," ujar Geredeg saat membuka acara lomba mata pelajaran IPA Tingkat SMP di Gedung UKM Center Amlapura, Sabtu (25/4).

Menurutnya, saat ini Pemkab Karangasem juga tungan SMK Negeri Amlapura dengan lahan 2,4 hektare. Nantinya aset SMK ini harus diserahkan ke Pemprov Bali. Geredeg juga mempertanyakan apakah setelah kewenangan ada di Pemprov masih akan ada insentif guru.

Terkait kegundahannya ini, Geredeg berjanji akan melapor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen). "Kita berharap UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah ditinjau kembali.

Alasannya, telah berlaku pemerintahan otonom tingkat kabupaten," katanya.

Sedangkan sesuai ketentuan UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, berlaku efektif sebenarnya dua tahun sejak UU tersebut diundangkan. Sebab UU No 23 tahun 2014 disahkan 2 Oktober 2014,

mestinya efektifnya berlaku 2 Oktober 2016. Namun karena saat ini masih tahap pendataan aset sekolah, personal termasuk sarana dan prasarana yang batas akhirnya 2 Oktober 2016, sehingga UU itu baru efektif berlaku per 1 Januari 2017.

Namun walau gundah, Geredeg tetap melihat sisi positif SMA/SMK diambilalih Provinsi. "Beberapa gedung bantuan Provinsi Bali yang belum kelar, pembangunannya bisa berlanjut seperti Gedung Kantor Guru SMAN 2 Amlapura, dan gedung lainnya," katanya.

Kadisdikpora Karangasem, I Gede Ariyasa menambahkan dengan diambilalih penanganan SMA/SMK ke Provinsi Bali, sehingga segala kebutuhan sekolah itu menjadi tanggungjawab provinsi. Terutama menyangkut



• NUSABALI/NANTRA  
BUPATI Karangasem, I Wayan Geredeg (kanan) dan Kadisdikpora I Gede Ariyasa saat mengumumkan kekhawatiran SMA/SMK diambilalih Provinsi, Sabtu (25/4).

personal tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga menyangkut teknis.

"Sesuai UU, sebelum 2 Oktober 2016, agar seluruh aset telah disetorkan ke Provinsi, kemudian mulai berlaku penanganannya per 1 Januari 2017," katanya. Di bagian lain Kabag Perlengkapan Setdakab Karangasem, I Nyoman Dani mengakui telah mendata seluruh aset tanah Pemkab Karangasem termasuk tanah sekolah. Banyak tanah sekolah yang belum bersertifikat. Sebab, penyerahan dari Pemprov Bali ke Karangasem pada tahun 2005 lalu, tanpa bukti pemindahan hak ke Pemkab Karangasem. Di Karangasem sendiri ada 20 SMA Negeri dan swasta, termasuk MAN dan MA Swasta, dengan 7.991 siswa, serta 11 SMK Negeri dan swasta dengan 4.211 siswa. k16

Edisi : Senin, 27 April 2015

Hal : 5



# Target PAD Rp 10 Triliun Terancam

## ★ Pemprov Bali Kehilangan Sumber Pendapatan dari Tiga Sektor Pajak

Pemprov Bali terpaksa pangkas pengeluaran anggaran, tanpa harus ganggu program 'pro rakyat' Bali Mandara

DENPASAR, NusaBali

Target Pemprov Bali untuk meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) tembus angka Rp 10 triliun dalam 3 tahun ke depan, terancam berantakan. Masalahnya, Bali kehilangan sumber pendapatan dari tiga sektor pajak, termasuk minuman beralkohol dan Bahan Bakar Minyak (BBM), akibat terbentur aturan perundang-undangan. Karena itu, Pemprov bakal memangkas pengeluaran anggaran, tanpa ganggu program pro rakyat Bali Mandara.

Gubernur Bali Made Mang-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

### 3 SUMBER PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK YANG MENURUN KARENA ATURAN

- **Pertama**, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang PBBKB yang besaran pajaknya diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen, agar harga BBM di Bali sama dengan daerah lainnya.
  - ✓ Tahun 2014 lalu, pendapatan pajak dari PBBKB mencapai Rp 300 miliar
  - ✓ Tahun 2015 ini, pungutan pajak dari PBBKB potensi turun sekitar Rp 50 miliar. Padahal, Dispenda Bali semula targetkan dapat Rp 325 miliar
- **Kedua**, turunya pendapatan dari pajak minuman beralkohol (mikol), menyusul penghapusan label mikol di Bali atas perintah perundang-undangan. Padahal, label mikol selama ini diberlakukan Pemprov Bali untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol
  - ✓ Tahun 2014, pendapatan dari pajak label mikol Rp 27 miliar-Rp 30 miliar
  - ✓ Tahun 2015, pendapatan dari pajak mikol Rp 27 miliar-Rp 32 miliar lenyap
- **Ketiga**, hilangnya pendapatan dari pajak subsidi biaya balik nama kendaraan bermotor, akibat Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - ✓ Versi Dispenda Provinsi Bali, daerah kehilangan Rp 97 miliar setahun karena aturan Permendagri Nomor 101/2014 tentang PKB dan BBNKB

Edisi : Senin, 27 April 2015

Hal : 1



Sambungan

## Target PAD Rp 10 Triliun Terancam

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ku Pastika menyebutkan, daerah setidaknya kehilangan Rp 50 miliar per tahun dari pajak BBM. Ini karena adanya pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari 10 persen menjadi 5 persen, sesuai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), untuk menormalisasi harga BBM di Bali.

"Kita kehilangan Rp 50 miliar tiap tahun, karena peraturan mengharuskan turunkan pajak PBBKB dari 10 persen menjadi 5 persen," ujar Gubernur Pastika dalam acara simakrama dengan masyarakat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur-an, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (25/4).

Selain pendapatan pajak dari PBBKB, kata Gubernur Pastika, Bali juga kehilangan Rp 32 miliar akibat penghapusan label minuman beralkohol (mikol). "Label mikol itu tujuannya mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Dari label itu, kita dapat retrebusi. Tapi, pemerintah pusat melarang pungutan retrebusi dengan label, karena terjadi pajak ganda," tandas Pastika.

Sekarang lanjut Pastika, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2014 yang mengendalikan peredaran mikol di Bali, sehingga pendapatan pajak dari minuman beralkohol dipastikan turun. Pemerintah pusat memang memberlakukan pengecualian untuk Bali, karena ini daerah pariwisata. Tapi, tetap saja terjadi penurunan pendapatan dari pajak mikol.

"Makanya, kita minta sekarang efisiensi anggaran. Kurangi pengeluaran yang tidak penting, karena banyak pendapatan yang menurun," ujar Gubernur Bali Pertama asal kawasan utara Buleleng ini. Selain itu, juga akan efektifkan pemberlakuan pajak online di Bali. Dengan sistem online, pendapatan pajak lebih gampang dipantau,

bahkan bisa diamati per detik.

Ketika pajak dipungut secara online, kata Pastika lagi, bisa dihitung per detik secara akurat, berapa miliar rupiah masuk ke daerah. Pastika pun sudah minta supaya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melakukan kerjasama terkait sistem pajak online ini.

Pastika menyebutkan, rumah makan Bebek Bengil di kawasan wisata Ubud, Gianyar, misalnya, bisa menghasilkan pajak cukup besar bagi daerah. Sebab, setiap pembelian makanan, dipungut pajak 10 persen. Dari pajak restoran saja, rakyat sudah bisa hidup, belum lagi pajak-pajak yang lainnya. "Cuma masalahnya, kenapa tidak mau online? Padahal, kalau pajak dipungut online, setiap detik bisa dipantau," sebut Gubernur kelahiran Desa 'Miskin' Sanggalingit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali, I Made Santha, menyatakan pihaknya cukup pusing dengan penurunan pendapatan dari sektor pajak. Target Bali untuk meraih PAD tembus angka Rp 10 triliun dalam 3 tahun ke depan hingga 2018 pun terancam. "Target kita untuk meraih PAD Rp 10 triliun tahun 2018, ada potensi terganggu. Kami sekarang sedang memikirkan bagaimana menyiasati, agar pencapaian target tidak terganggu," ungkap Made Santha kepada NusaBali di Denpasar, Minggu (26/4).

Menurut Made Santha, ada 3 sumber pendapatan dari sektor pajak yang potensial menurun karena aturan. Pertama, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang PBBKB yang besaran pajaknya diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen, agar harga BBM di Bali sama dengan daerah lainnya.

Disebutkan Made Santha, tahun 2014 lalu, pendapatan pajak dari PBBKB mencapai Rp 300 miliar. Namun, di tahun 2015 ini, pungutan pajak dari PBBKB kemungkinan ada

penurunan pendapatan sekitar Rp 50 miliar. Padahal, di tahun 2015 ini dicanangkan target pendapatan PBBKB mencapai Rp 325 miliar. "Angkanya sih biasa berfluktuasi, tergantung Pertamina. Karena mereka yang memberikan angka dari jumlah penjualan BBM di Bali. Tapi, potensi turunnya mencapai Rp 50 miliar," ujar Santha.

Sumber pendapatan kedua dari pajak yang potensi menurun, kata Made Santha, adalah penghapusan label mikol di Bali atas perintah perundang-undangan. Pemerintah pusat melarang pungutan pajak dari label mikol. Padahal, label mikol sebelumnya diberlakukan Pemprov Bali untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

Menurut Made Santha, pendapatan Bali dari pajak label mikol tahun 2014 mencapai Rp 30 miliar. Tapi, di tahun 2015, pendapatan dari pajak mikol hilang. "Karena label edar mikol atas perintah pusat, tidak boleh diberlakukan. Jadi, kita kehilangan antara Rp 27 miliar sampai Rp 32 miliar tahun ini," ujar Made Santha.

Sumber pendapatan ketiga bagi Bali yang turun, kata dia, adalah pajak dari subsidi biaya balik nama kendaraan bermotor. Hal ini akibat adanya Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kalau sebelumnya, kata Made Santha, PKB dan BBNKB untuk angkutan umum orang mendapatkan subsidi 30 persen. nah, pasca adanya Permendagri 101 Tahun 2014, subsidi terhadap angkutan umum orang ditetapkan naik sebesar 70 persen. "Artinya, pendapatan kita berkurang, karena subsidi jadi naik. Pembayaran pajak oleh masyarakat itu turun dari kenaikan subsidi," jelasnya.

Hal itu, kata Made Santha, belum termasuk subsidi angku-



Sambutan

tan barang yang juga naik dari subsidi 20 persen jadi 50 persen. Karenanya, Pemprov Bali harus kehilangan lagi subsidi dari dua variabel PKB dan BBNKB atas berlakunya Permendagri 101 Tahun 2014. "Kalau dirupiahkan, kita bisa kehilangan Rp 97 miliar setahun dari adanya Permendagri tersebut," ujar Santa.

Gara-gara potensi penurunan tiga sumber pendapatan dari sektor pajak ini, Pemprov Bali terpaksa harus mengencangkan ikat pinggang ke depan dengan efisiensi anggaran. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Putu Astawa, atas kebijakan Gubernur Pastika, pemerintah harus memangkas beberapa pos anggaran. Mulai dari perjalanan dinas pejabat di setiap SKPD atau dinas, hingga memangkas anggaran untuk pertemuan-pertemuan yang tidak penting.

"Termasuk tidak melakukan pertemuan di hotel, yang sudah lama memang dilaksanakan sebelum penurunan anggaran dan kebijakan pusat," ujar Putu Astawa saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Minggu kemarin.

Selain itu, kata Putu Astawa, juga memangkas pengeluaran untuk perjalanan dinas berupa promosi pariwisata. "Promosi pariwisata tidak dihapus, namun dikurangi. Saya tidak ingat persis, berapa angkanya selama ini. Itu ada di Dinas Pariwisata," ujarnya.

Kendati ada pemangkasan anggaran, kata Putu Astawa, program-program 'pro rakyat' Bali Mandara tidak diganggu alias tetap jalan. Pada 2015 ini, Pemprov Bali mengucurkan anggaran ratusan miliaran rupiah untuk program Pemprov Bali (Bali Mandara). "Program Bali Mandara tidak terkena dampak akibat penurunan pendapatan sektor pajak. Ini tidak masuk efisiensi, karena program kemasyarakatan," tandas Putu Astawa. **nat**